

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi hutan yang ada di sekitar Desa Temalang relatif lebih baik karena faktor gangguan yang terjadi lebih rendah dibandingkan dengan hutan di sekitar Desa Sungai Bemban. Gangguan yang terjadi sebagian besar diakibatkan aktivitas masyarakat yang menebang dan membuka lahan untuk perkebunan. Besarnya gangguan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keanekaragaman spesies hutan di sekitar Desa Sungai Bemban (H' 1,7 – 3,3) dibandingkan dengan hutan yang ada di sekitar Desa Temalang (H' 3,8 – 4,3). Kondisi biofisik lainnya pada kawasan hutan di KPHP Model Unit VII-Hulu Sarolangun yaitu tanah yang termasuk dalam kelompok lahan marginal dengan tingkat kemasaman yang tinggi, kelas kemampuan lahan IV dan VI, dan termasuk dalam tipe iklim A atau sangat basah.
2. Kondisi sosial ekonomi responden yang ada di Desa Sungai Bemban dan Desa Temalang dapat dikatakan sangat rendah di mana sebagian besar diantaranya (88%) bekerja sebagai petani dan didominasi oleh mereka yang berpenghasilan < Rp. 1.000.000 yakni sebanyak 79%. Sementara itu sebanyak 59 % responden memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai di tingkat dasar (SD – SMP) dan berdasarkan kelas umur hampir keseluruhan responden (96%) termasuk dalam kelompok usia produktif.
3. Terdapat perbedaan persepsi responden di kedua desa mengenai faktor penyebab kerusakan hutan, kondisi hutan, dan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pihak KPHP. Sebagian besar responden di Desa Sungai Bemban memiliki persepsi bahwa hutan dalam keadaan yang buruk, kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan KPHP sudah cukup baik, dan kebakaran dianggap sebagai faktor utama penyebab kerusakan hutan. Sementara itu

responden yang ada di Desa Temalang menganggap hutan dalam kondisi yang baik dan begitu juga halnya dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh KPHP, sedangkan kegiatan PETI dianggap sebagai faktor utama penyebab kerusakan hutan. Adapun untuk keberadaan hutan tidak terdapat perbedaan persepsi di antara kedua desa tersebut di mana sebagian besar responden menginginkan agar sumber daya hutan dapat dikelola secara lestari.

4. Secara keseluruhan dapat dikatakan partisipasi responden berada pada tingkatan yang rendah. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yaitu karakteristik individu seperti pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan, persepsi terhadap kondisi hutan dan persepsi mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh KPHP. Faktor lainnya yang diduga berpengaruh antara lain kesempatan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, komunikasi, dan manfaat dari program/kegiatan yang dijalankan.
5. Strategi yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Unit VII-Hulu - Sarolangun antara lain :
 - Peningkatan kapasitas SDM masyarakat sekitar hutan (individu ataupun kelembagaan), tenaga penyuluh lapangan, dan pengelola (KPHP) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
 - Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait guna mensinergikan program yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam kegiatan pembangunan kawasan hutan
 - Mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan dan LSM dalam membangun komunikasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan di KPHP.
 - Mendorong pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan terkait upaya pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan KPHP Unit VII-Hulu Sarolangun dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya pengawasan dan evaluasi secara periodik/berkala terhadap implementasi dari program yang dituangkan dalam RPHJP agar mampu menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Pihak KPHP harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam tahap kegiatan ini karena terbatasnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat pada saat perumusan rencana kegiatan/program sebelumnya. Keputusan yang diambil diharapkan mampu merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga mereka akan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan pengelolaan hutan.
2. Kegiatan pendampingan baik yang dilakukan oleh KPHP ataupun LSM hendaknya disesuaikan dengan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat dan perlu adanya kontinuitas/kesinambungan serta sinergitas dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut penting dilakukan agar program pemberdayaan yang dijalankan mampu memberikan hasil yang nyata bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat (peningkatan kesejahteraan) dan lingkungannya (terjaganya kelestarian ekosistem dan fungsi dari kawasan hutan) secara berkelanjutan.
3. Perlu dilakukan analisis kesesuaian lahan terhadap beberapa bentuk *existing* dan rencana penggunaan lahan berdasarkan kondisi biofisik kawasan hutan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.